

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Proklamasi di Kota Padang Panjang yang berfokus di Tahun 2019. Berdasarkan hasil dari temuan dan analisis data yang telah peneliti paparkan sebelumnya jika dikaitkan dengan model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Carl Van Horn dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan, implementasi Proklamasi di Kota Padang Panjang telah berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan sumber daya yang memadai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan Proklamasi Tahun 2019 dan respon positif oleh implementor serta keyakinan yang baik pada program.

Akan tetapi terdapat beberapa kendala seperti, tidak semua implementor memahami program karena komunikasi yang tidak berjalan efektif di dalam Tim Pembina Proklamasi. Situasi ini berkaitan dengan sumber daya manusia Tim Pembina Proklamasi yang berasal dari OPD berbeda-beda dan adanya keterikatan dengan tupoksi masing-masing di OPD asal. Kondisi ini diakibatkan oleh belum adanya batasan antara pelaksanaan Proklamasi dengan kegiatan yang menjadi tupoksi mereka. Karena, ketidak-hadiran peraturan khusus serta tugas di dalam SK Tim Pembina yang belum spesifik. Hal demikian menyebabkan ketidak-jelasan peran masing-masing anggota Tim Pembina Proklamasi. Terakhir, adanya pergantian orang di dalam tim tiap tahun pelaksanaan sehingga perlu menanamkan pemahaman ulang tentang Proklamasi ke Tim Pembina.

6.2 Saran

6.2.1 Teoritis

Peneliti menyarankan agar studi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Carl Van Horn dapat dikembangkan dengan kajian lain atau beragam. Selain itu, studi mengenai Proklamasi juga diharapkan lebih dikembangkan oleh disiplin ilmu Administrasi Publik maupun disiplin ilmu lain. Mengingat cakupan Proklamasi yang luas dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Kemudian, studi teoritis mengenai Proklamasi dapat dijadikan studi perbandingan antar daerah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Proklamasi di berbagai daerah.

6.2.2 Praktis

Saran secara praktis memuat hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kebijakan maupun metode menjalankan bagi pemerintah. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, peneliti memiliki saran secara praktis kepada Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

- Menjadikan isu lingkungan sebagai isu strategis kota di dalam RPJMD Kota Padang Panjang periode berikutnya.

2. Dinas Perkim LH

- Membuat SOP khusus kegiatan Proklamasi agar pembagian peran di dalam Tim Pembina lebih jelas.
- Menetapkan susunan Tim Pembina yang tetap, agar tidak ada pengulangan terkait pemahaman anggota tim terkait Proklamasi.

- Merubah pola komunikasi dan koordinasi kepada instansi di luar Dinas Perkim LH agar terciptanya kesamaan pengetahuan akan Proklamasi dan visi yang ingin dicapai baik melalui tatap muka secara langsung dengan menjadwalkan secara teratur.
- Melakukan inovasi penjangkauan lokasi Proklamasi di seluruh kelurahan dengan observasi yang mendalam di seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang, bukan meminta kelurahan untuk mengisi form saja.

3. Kecamatan

- Terlibat aktif di dalam pelaksanaan Proklamasi bersama dengan kelurahan.

4. Kelurahan

- Mendorong masyarakat di tiap kelurahan untuk lebih aktif dan partisipatif terhadap kegiatan berbasis lingkungan dengan promosi Proklamasi di Kota Padang Panjang secara berkesinambungan, agar pelaksanaan Proklamasi dapat menyeluruh di Kota Padang Panjang.

